

Simulasi Ujian Sertifikasi Tk. Dasar

BENTUK DAN JUMLAH SOAL, SERTA WAKTU UJIAN

- ▶ BENTUK BENAR/SALAH : 25 SOAL
- ▶ BENTUK PILIHAN GANDA : 65 SOAL
- ▶ WAKTU PELAKSANAAN UJIAN : 120 MENIT (2 JAM)



PEMBOBOTAN NILAI SOAL

- ▶ NO. 1 S.D 25 : BENTUK SOAL BENAR/SALAH
 - JIKA JAWABAN BENAR (+2)
 - JIKA JAWABAN SALAH /TIDAK DIJAWAB (0)
- ▶ NO. 26 S.D 80 : BENTUK SOAL PILIHAN GANDA
 - JIKA JAWABAN BENAR (+3)
 - JIKA JAWABAN SALAH /TIDAK DIJAWAB (0)
- ▶ NO. 81 S.D 90 : BENTUK SOAL PILIHAN GANDA(KASUS)
 - JIKA JAWABAN BENAR (+4)
 - JIKA JAWABAN SALAH/ TIDAK DIJAWAB (0)

KELULUSAN

| Nilai Ambang Batas | Masa Berlaku |
|--------------------------------|----------------|
| $> 65 \%$ $\Rightarrow 167$ | Tidak Terbatas |

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian bersifat buka buku (*open book*) khusus Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), serta Modul Pelatihan PBJ tingkat dasar LKPP;
2. Dilarang saling bekerjasama;
3. Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu lain seperti : kertas tambahan, hand phone, kamera, kalkulator, dan alat-alat elektronik. Untuk keperluan corat-coret silahkan gunakan naskah soal;
4. Peserta ujian yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebelum batas akhir waktu ujian diwajibkan meninggalkan ruang ujian. Lembar jawaban dimasukkan/diselipkan pada lembar soal dan diletakkan di atas meja/kursi peserta ujian yang bersangkutan;



TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

5. Selama Ujian berlangsung Kartu Identitas Diri (KTP, Kartu Pegawai, SIM, dan lain-lain) tetap berada di atas meja;
6. Peserta dan Pengawas tidak diperkenankan merokok selama ujian berlangsung;
7. Peserta dan Pengawas harus mematikan Handphone (bukan *silent*). Selama Ujian berlangsung peserta dilarang melakukan percakapan melalui *handphone*, mengirim dan menerima SMS.



Peserta akan dinyatakan gugur apabila :

1. Peserta tidak terdaftar dalam Data Lengkap Peserta yang ditetapkan panitia/penyelenggara;
2. Peserta tidak menandatangani Daftar Hadir;
3. Melakukan praktek Perjokian, setiap peserta wajib menunjukkan kartu identitas (KTP, SIM) kepada pengawas LKPP saat ujian berlangsung;
4. Melanggar tata tertib;
5. Mengikuti Ujian sebelum Masa Tenggang 14 hari kalender.



**SIMULASI SOAL UJIAN
SERTIFIKASI TK. DASAR
No. 27**

TIPE : B/S

1. Spesifikasi teknis mempengaruhi penyusunan HPS. **B**
2. Pembuktian kualifikasi terhadap penyedia yang menjadi calon pemenang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE (online). **S**
3. Untuk pengadaan langsung dengan nilai kurang dari Rp1 juta tidak perlu dibuat bukti perjanjian. **S**
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan cara Swakelola, laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana Swakelola. **B**
5. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. **B**

TIPE : B/S

6. Pekerjaan konstruksi yang bersifat tidak kompleks dengan nilai Rp250 juta dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung. **S**
7. Kesesuaian jadwal pengadaan dengan kondisi nyata di lokasi pengadaan harus dikaji ulang pada saat akan melaksanakan pengadaan. **B**
8. Daftar kuantitas dan harga harus ada dalam kontrak harga satuan karena tanpa itu akan terdapat kesulitan pembayaran. **B**
9. Pokja ULP menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan dengan nilai Rp123 milyar. **S**
10. Pengadaan dengan mengkompetisikan hasil kerajinan yang sudah dibuat dapat menggunakan metode sayembara karena memperlombakan barang yang tidak memiliki harga pasar dan tidak memiliki harga satuan. **S**

TIPE : B/S

11. Paket pekerjaan swakelola yang dicantumkan dalam RUP, tidak perlu dibahas dalam kaji ulang RUP. **S**
12. Dalam setiap penyusunan HPS pekerjaan apapun harus dibuat analisa harga satuan pekerjaan yang terinci yang terdiri atas harga satuan dasar bahan, harga satuan dasar alat, dan harga satuan dasar upah. **S**
13. Dalam kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang telah mencantumkan tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan, tidak perlu lagi diterbitkan SPMK. **S**
14. Pembukaan file penawaran penyedia menggunakan aplikasi pengaman dokumen. **B**
15. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi non darurat, SPMK diterbitkan setelah kontrak pengadaan barang ditandatangani. **B**

TIPE : B/S

16. Faktor perubahan biaya dalam biaya kontrak pekerjaan tahun sebelumnya, dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan HPS. **B**
17. PPHP dapat melakukan pengujian terhadap barang yang akan diserahkan. **B**
18. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola Informasi Kinerja Penyedia. **B**
19. Dalam penyusunan HPS jasa konsultansi semua unsur biaya ditambahkan keuntungan sebesar 10%. **S**
20. Jadwal evaluasi dokumen penawaran yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP bersifat mengikat sehingga tidak boleh diubah. **S**

TIPE : B/S

21. Dalam kualifikasi penyedia, maka diharuskan pimpinan dan pengurus badan usaha (penyedia) adalah bukan sebagai pegawai K/L/D/I. **B**
22. PPK dapat tidak setuju dengan penetapan pemenang yang dilakukan Pokja ULP. **B**
23. Adendum dokumen pemilihan tidak dapat digunakan sebagai pedoman melakukan evaluasi teknis penawaran. **S**
24. Salah satu persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh penyedia barang ialah memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai paling kurang sama dengan nilai paket pekerjaan yang akan dilelangkan. **S**
25. Pokja ULP mengusulkan perubahan HPS kepada PPK karena kondisi lapangan pada saat akan dilaksanakannya pelelangan telah banyak berubah dibandingkan dengan kondisi saat HPS ditetapkan. **B**

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

26. Yang bukan merupakan isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) : **D**
 - A. Judul SPK.
 - B. Nomor dan tanggal SPK.
 - C. Nomor dan tanggal surat permintaan penawaran.
 - D. Nama dan alamat PA/KPA.
27. Evaluasi kualifikasi untuk jasa konsultasi badan usaha dilakukan sebagai berikut: **C**
 - A. Penilaian persyaratan kualifikasi dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi menggunakan sistem gugur.
 - B. Penilaian persyaratan kualifikasi dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi menggunakan sistem nilai.
 - C. Penilaian persyaratan kualifikasi menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi menggunakan sistem nilai.
 - D. Penilaian persyaratan kualifikasi menggunakan sistem nilai, sedangkan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi menggunakan sistem gugur.

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

28. Dalam metode evaluasi kualitas dan biaya, negosiasi biaya dilakukan agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis terhadap :

- A. Total penawaran yang melebihi pagu anggaran.
- B. Total penawaran yang tidak melebihi pagu anggaran.
- C. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran.
- D. Total penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi pagu anggaran.

29. Yang bukan merupakan tahapan dalam kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa ialah:

- A. Pengumuman pengadaan barang/jasa.
- B. Melaksanakan rapat penjelasan.
- C. Menetapkan PPK.
- D. Pembukaan penawaran.

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

30. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- A. Pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung.
- B. Pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, dan pengadaan langsung.
- C. Pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.
- D. Pelelangan, sayembara, dan kontes.

31. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PA/KPA memutuskan, dengan ketentuan:

- A. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia dinyatakan gagal.
- B. Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Pokja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan Pokja ULP untuk mengeluarkan SPPBJ.
- C. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan penunjukan langsung untuk mempercepat proses pengadaan.
- D. Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang dan PA/KPA mengeluarkan SPPBJ.

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

32. Pada pelaksanaan Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu File, peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan peringkat teknis kepada Pokja ULP disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan :

- A. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis.
- B. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis.
- C. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis.
- D. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis.

B

33. Untuk SPK jasa konsultansi, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan :

- A. Sebelum tanggal penandatanganan SPK atau sebelum tanggal dikeluarkannya SPMK.
- B. Sebelum tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.
- C. Setelah tanggal penandatanganan SPK.
- D. Sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

D

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

34. Cara pengadaan kegiatan pelatihan pegawai senilai Rp250 juta dapat dilakukan :

- A. Swakelola pelatihan di kantor sendiri, swakelola pelatihan di balai diklat suatu instansi atau Swakelola dengan lembaga swasta ternama dengan penunjukan langsung.
- B. Swakelola pelatihan di kantor sendiri atau melalui penyedia lembaga swasta ternama dengan penunjukan langsung.
- C. Swakelola pelatihan di kantor sendiri atau swakelola pelatihan di balai diklat suatu instansi.
- D. Swakelola pelatihan di kantor sendiri atau swakelola dengan lembaga swasta ternama dengan penunjukan langsung.

C

35. Agar proses pengadaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, PA perlu memahami RUP berikut ini :

- A. Menetapkan besarnya honor Pokja ULP.
- B. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- C. Menetapkan jadwal pemilihan.
- D. Memastikan tersedianya anggaran untuk kegiatan.

D

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

36. Siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah :

- A. Pokja ULP.
- B. PPHP.
- C. Pejabat Pengadaan.
- D. PPK.

B

37. Pihak dalam organisasi pengadaan yang menetapkan suatu paket pengadaan akan dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung bukan keadaan darurat, ialah :

- A. PA pada saat membuat RUP.
- B. Pokja ULP pada saat membuat Rencana Pemilihan.
- C. PPK pada saat membuat Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
- D. PPK dan Pokja ULP pada saat melakukan kaji ulang terhadap RUP.

B

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

38. Penyedia jasa konsultansi pada saat penyelesaian pekerjaannya wajib menyerahkan laporan dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan kontrak. Pernyataan yang salah terkait kondisi diatas ialah :

- A. Penyedia menyerahkan draft laporan penyelesaian pekerjaan.
- B. Penyedia bersama pihak yang berkepentingan melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen penyelesaian pekerjaan.
- C. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- D. Laporan dan dokumen mendapat persetujuan PA.

A

39. Siapa yang berwenang menetapkan spesifikasi jasa konsultansi.

- A. PA/KPA.
- B. PPK.
- C. Pokja ULP.
- D. Pejabat Pengadaan.

B

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

40. Bila kontrak diputus karena kesalahan penyedia, maka dapat dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia cadangan berikutnya atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat oleh :

- A. Pokja ULP.
- B. PPK.
- C. PA.
- D. KPA.

A

41. RUP suatu SKPD dapat diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, bila :

- A. Kepala Daerah telah menyetujui usulan RUP dari SKPD.
- B. Rancangan Perda tentang APBD telah diajukan Pemda ke DPRD.
- C. Rancangan Perda tentang APBD sedang dibahas bersama oleh Pemda dan DPRD.
- D. Rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD.

D

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

42. Tanda bukti perjanjian untuk pembelian kendaraan bermotor senilai Rp2 miliar melalui E-Purchasing, adalah :

- A. Kuitansi.
- B. SPK.
- C. Surat Perjanjian.
- D. Surat Pesanan.

D

43. Dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultasi hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak antara lain :

- A. Program mutu, rencana kerja dan rencana penyelesaian pekerjaan lapangan.
- B. Program mutu, rencana kerja dan rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
- C. Program mutu, organisasi kerja dan rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
- D. Program mutu, organisasi kerja dan rencana pencairan tagihan (termin).

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

44. Kumpulan karakter (string) yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi user id disebut :

- A. Apendo/Spamkodok.
- B. Spamfilter.
- C. Verifikator.
- D. Password.

D

45. Pada pengadaan langsung peralatan kantor senilai Rp49,50 juta, kuitansi ditandatangani oleh :

- A. PA/KPA.
- B. PPK.
- C. Pejabat Pengadaan.
- D. Ketua Pokja ULP.

B

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

46. Dalam menyusun paket pekerjaan jasa konsultasi, ketentuan yang harus dipenuhi adalah :

- A. Menetapkan paket yang ditujukan untuk penyedia dalam negeri dalam rangka pembatasan penawaran asing.
- B. Mengutamakan prinsip efisiensi dengan mengutamakan paket untuk pengusaha nasional dan asing.
- C. Memaksimalkan produksi dalam negeri dan menetapkan paket sebanyak-banyaknya untuk usaha non kecil agar lebih efisien.
- D. Memaksimalkan produksi dalam negeri dan menetapkan paket tanpa membedakan peruntukannya bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi atau non kecil.

A

47. Dalam penyusunan dokumen pemilihan, mana dokumen pendukung yang tidak diperlukan :

- A. Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- B. Gambar-gambar pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.
- C. Rincian HPS.
- D. Daftar kuantitas dan harga.

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

48. Apabila dari penjelasan dokumen pemilihan jasa konsultansi terjadi perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup kegiatan, kualifikasi tenaga ahli, dan total nilai HPS, sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan harus mendapatkan persetujuan dari :

- A. Ketua ULP.
- B. PPK.
- C. PA/KPA.
- D. Semua peserta.

B

49. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP, dan/atau PPK, maka tidak boleh dilakukan hal berikut :

- A. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam.
- B. Anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
- C. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan persetujuan PA/KPA.
- D. PPK menyatakan lelang gagal, apabila tidak ada peserta lain yang memenuhi syarat.

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

50. Apabila dalam proses evaluasi kualifikasi sebelum batas akhir pemasukan dokumen isian kualifikasi Pokja ULP menemukan hal-hal yang kurang lengkap, maka :

- A. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan Peserta dinyatakan gugur.
- B. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan proses dinyatakan gagal sehingga dilakukan seleksi ulang.
- C. Pokja ULP melakukan klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani oleh Pokja ULP dan peserta tanpa mengubah persyaratan kualifikasi.
- D. Pokja ULP melakukan klarifikasi secara tertulis dan kemudian mengubah persyaratan substansi kualifikasi.

D

51. Batas waktu penyampaian surat jaminan pelaksanaan kepada PPK untuk pekerjaan pembangunan jalan senilai Rp800 juta ialah :

- A. Selambat-lambatnya 2 hari setelah kontrak ditandatangani oleh penyedia dan PPK.
- B. Pada hari yang sama dengan pengumuman pemenang.
- C. Sebelum dokumen kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- D. Setelah penandatanganan kontrak dan sebelum keluarnya SPMK

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

52. PPK dalam menyiapkan rancangan surat perjanjian/kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi wajib melakukan penelitian dan identifikasi struktur dan isi kontrak yang terdiri dari :

- A. Surat perjanjian, surat penawaran, dan dokumen lain yang diperlukan.
- B. Pokok perjanjian, syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, Kerangka Acuan Kerja dan dokumen lain yang merupakan bagian kontrak.
- C. Addendum kontrak, pokok perjanjian, surat penawaran, Kerangka Acuan Kerja dan Gambar-gambar.
- D. Pokok perjanjian, surat penawaran, syarat khusus kontrak, syarat umum kontrak dan Kerangka Acuan Kerja.

B

53. Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan Jasa Konsultansi bertujuan :

- A. Memastikan bahwa biaya pengadaan yang dianggarkan mampu menyerap pagu sementara yang telah ditetapkan.
- B. Memastikan bahwa kode akun dalam dokumen anggaran telah sesuai dalam jenis belanja modal.
- C. Memastikan bahwa kode akun belanja telah sesuai peruntukan dan jenis pengeluaran.
- D. Memastikan bahwa biaya pengadaan berlebih sehingga menghasilkan sisa anggaran pada akhir kegiatan pengadaan.

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

54. Jaminan Pelaksanaan untuk pengadaan jasa lainnya diperlukan dalam hal :

- A. Pengadaan melalui E-Purchasing.
- B. Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat.
- C. Pengadaan melalui E-Lelang senilai Rp300 juta.
- D. Aset penyedia sudah dikuasai Pengguna.

C

55. Tugas dan kewenangan di bawah ini, manakah yang salah :

- A. PPK menetapkan antara lain spesifikasi teknis, gambar, dan HPS.
- B. PPK menetapkan antara lain spesifikasi teknis, jadwal pemilihan penyedia, dan HPS.
- C. Pokja ULP menetapkan antara lain metode pemilihan, metode kualifikasi, metode evaluasi, dan jadwal pemilihan pengadaan.
- D. Pokja ULP menetapkan antara metode pemilihan, metode penyampaian penawaran, dan metode evaluasi penawaran.

B

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

56. Penyedia telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, bila :

- A. Memiliki NPWP.
- B. Telah menyerahkan SPT Tahunan.
- C. Memiliki Surat Keterangan Fiskal.
- D. Menyerahkan laporan bulanan PPh.

B

57. Untuk mencegah Penyedia Barang/Jasa melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa maka dibutuhkan surat pernyataan berupa :

- A. Surat Jaminan Penawaran.
- B. Surat Perjanjian.
- C. Pakta Integritas.
- D. Formulir Isian Kualifikasi.

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

58. Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5 miliar adalah :

- A. Pelelangan Umum.
- B. Pelelangan Terbatas.
- C. Seleksi Langsung.
- D. Pemilihan Langsung.

D

59. Persyaratan yang tidak perlu dipenuhi oleh peserta yang akan melakukan kemitraan pekerjaan konstruksi ialah :

- A. Peserta wajib mempunyai perjanjian kerja sama operasi (KSO).
- B. Evaluasi persyaratan kualifikasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
- C. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) lima kali pengalaman tertinggi, KD = 5 NPt.
- D. Tidak masuk dalam daftar hitam.

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

60. PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atau menerima penyerahan pekerjaan :

- A. Pada saat bagian pekerjaan diserahkan Penyedia.
- B. Sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan menurut ketentuan Kontrak.
- C. Setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- D. Tidak diperlukan pengujian terhadap pekerjaan.

61. Yang tidak termasuk dokumen pemilihan untuk pevelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung ialah :

- A. Undangan/pengumuman.
- B. Instruksi kepada peserta.
- C. Rancangan kontrak.
- D. Rincian HPS.

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

62. Dalam hal PPK akan memutuskan kontrak sepihak karena keterlambatan penyedia menyelesaikan kontrak, maka :

- A. PPK wajib memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada penyedia sampai dengan 50 hari kalender.
- B. Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
- C. Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan setelah masa pelaksanaan kontrak tidak dapat melampaui Tahun Anggaran.
- D. Pekerjaan yang tidak diselesaikan setelah pemutusan kontrak, dapat dilanjutkan oleh penyedia lain melalui penunjukan langsung.

63. Badiklat X berencana menyelenggarakan diklat prajabatan untuk para CPNS pada tahun 2015. Sebagai salah seorang Pokja ULP, Saudara akan mengidentifikasi unsur-unsur RUP yang perlu dikaji ulang secara lengkap :

- A. Cara pengadaan dan jenis diklat.
- B. Cara pengadaan, jenis barang/jasa, jumlah paket, jumlah kelas, dan nilai pekerjaan.
- C. Cara pengadaan, jumlah paket dan nilai paket.
- D. Jumlah peserta dan jumlah kelas.

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

64. Adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus :

- A. Dibuat oleh PPK disahkan oleh PA/KPA.
- B. Dibuat oleh PPK.
- C. Ditetapkan oleh PA.
- D. Memuat perubahan isi dokumen lelang/seleksi.

D

65. Yang tidak termasuk kebijakan umum dalam RUP ialah :

- A. Pemaketan pekerjaan.
- B. Cara pengadaan.
- C. Pengorganisasian pengadaan.
- D. Penentuan metode pemilihan.

D

66. Pekerjaan jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan melalui cara paling tepat yaitu :

- A. Seleksi.
- B. Sayembara.
- C. Penunjukan Langsung.
- D. Pemilihan Langsung.

C

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

67. Ketentuan subkontrak untuk pekerjaan non kecil :

- A. Penyedia wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya kepada usaha kecil.
- B. Dalam melakukan penagihan, penyedia tidak perlu melampirkan bukti pembayaran kepada subkontraktor.
- C. Penyedia dapat mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama.
- D. Penyedia tidak bertanggung jawab atas pekerjaan subkontraktor.

A

68. Dalam melakukan proses pengadaan, PA merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam pengadaan, salah satu tugas pokok PA yaitu :

- A. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- B. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- C. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- D. Menyerahkan hasil pekerjaan/penyelesaian pengadaan jasa konsultasi kepada pimpinan K/L/D/I.

A

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

69. Dalam pengumuman seleksi boleh mencantumkan persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dengan ketentuan :

- A. Mendapat persetujuan dari LKPP.
- B. Diperintahkan oleh Menteri yang membawahi instansi tersebut.
- C. Diperintahkan oleh PA/KPA.
- D. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

D

70. Ketentuan umum bagi Pokja ULP berkaitan dengan partisipasi peserta pada saat pemberian penjelasan :

- A. Dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- B. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak penawaran.
- C. Wajib diikuti seluruh peserta.
- D. Dapat menambah penilaian.

B

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

71. Metode pascakualifikasi dalam pekerjaan konsultansi dapat dilakukan untuk pengadaan :

- A. Perencanaan gedung 10 lantai dengan nilai Rp300 juta.
- B. Pengawasan pekerjaan bangunan gedung sekolah standar dengan nilai Rp100 juta.
- C. Kajian Rencana Tata Ruang Nasional dengan nilai Rp1 miliar.
- D. Masterplan Kabupaten dengan nilai Rp250 juta.

B

72. Untuk pengadaan jasa konsultansi berupa penyusunan modul untuk pelatihan perajin pada Badan Diklat Kabupaten ABC senilai Rp75 juta, dokumen asli pemilihan penyedia disimpan oleh :

- A. Pokja ULP.
- B. PPK.
- C. Pejabat Pengadaan.
- D. PA/KPA.

A

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

73. Untuk mempersingkat waktu penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak, maka pilihan penyelesaian sengketa yang dianjurkan sebaiknya :

- A. Peradilan Umum
- B. Peradilan Tata Usaha Negara
- C. Arbitrase
- D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

C

74. Pemasukan/penyampaian dokumen penawaran melalui fitur :

- A. Apendo/Spamkodok.
- B. Agregasi Data Penyedia.
- C. Form Isian Elektronik.
- D. User ID dan Password.

A

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

75. Penyesuaian harga dapat diberikan untuk kontrak :

- A. Lump sum.
- B. Tahun tunggal.
- C. Harga satuan yang kurang dari 12 bulan pelaksanaan pekerjaannya.
- D. Harga satuan yang lebih dari 12 bulan pelaksanaan pekerjaannya.

D

76. Urutan evaluasi penawaran jasa konsultasi dengan metode pemasukan 2 (dua) file yang paling tepat ialah :

- A. Evaluasi administrasi, evaluasi biaya, dan evaluasi teknis.
- B. Evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi biaya.
- C. Evaluasi biaya, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis.
- D. Evaluasi teknis, evaluasi administrasi, dan evaluasi biaya.

B

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

77. Pokja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan untuk pengadaan :

- A. Barang/jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lama.
- B. Pekerjaan kompleks.
- C. Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.
- D. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih padi, jagung, dan kedelai serta pupuk.

A

78. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab anggaran dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA :

- A. Setiap minggu.
- B. Setiap triwulan.
- C. Setiap bulan.
- D. Setiap hari.

D

TIPE : Alfa/Bravo/Charli/Delta

79. Pemerintah Kabupaten X akan melakukan pembangunan gedung kantor sederhana senilai Rp10,75 miliar, dengan alokasi dana : desain Rp0,5 miliar, konstruksi Rp10 miliar, dan pengawasan Rp0,25 miliar. Untuk itu, pemaketan yang tepat untuk pengadaan di atas adalah :

- A. 1 paket senilai Rp10,75 miliar.
- B. 2 paket senilai Rp10,50 miliar dan Rp0,25 miliar.
- C. 2 paket senilai Rp10,25 miliar dan Rp0,5 miliar.
- D. 3 paket senilai Rp0,5 miliar, Rp10 miliar, dan Rp0,25 miliar.

D

80. Pengadaan ATK suatu instansi pemerintah dalam satu tahun, lebih tepat :

- A. Harus menggunakan metode penunjukan langsung.
- B. Diadakan setiap saat melalui pembelian langsung.
- C. Diadakan setiap bulan agar bisa memakai metode pengadaan langsung.
- D. Diadakan dalam 1 (satu) paket dengan pengiriman bertahap.

D

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

81. Suatu dinas memerlukan pekerjaan pemeliharaan instalasi/peralatan pipa air minum sederhana dengan HPS senilai Rp190 juta. Di bawah ini terdapat empat pilihan yang tersedia.

Manakah pilihan yang paling tepat :

- A. Melakukan pelelangan umum.
- B. Melakukan pelelangan terbatas.
- C. Melakukan penunjukan langsung.
- D. Melakukan pengadaan langsung.

82. Pengadaan obat non generik yang banyak jenisnya untuk sebuah rumah sakit dan jumlahnya tidak pasti setiap bulan karena bergantung pada jenis penyakit yang diderita pasien dilakukan dengan metode pemilihan dan jenis kontrak :

- A. Penunjukan langsung dengan kontrak lump sum setiap kali obat habis.
- B. Pelelangan umum dengan kontrak harga satuan setiap bulan sesuai anggaran.
- C. Pelelangan terbatas dengan kontrak harga satuan setiap triwulan.
- D. Pelelangan umum dengan kontrak harga satuan untuk setahun.

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

83. Pembangunan rumah ibadah yang tidak sederhana senilai Rp3 miliar menggunakan dana pemerintah kabupaten pada Dinas Kesejahteraan Sosial. PA dalam menyusun RUP menggunakan kebijakan umum sebagai berikut :

- A. Menggunakan dana hibah kepada pengurus rumah ibadah.
- B. Dengan swakelola meminta Dinas PU untuk melaksanakan pembangunan.
- C. Dilaksanakan secara swakelola pengurus rumah ibadah.
- D. Dilaksanakan secara pemilihan penyedia melalui pemilihan langsung.

84. Pemerintah kabupaten hasil pemekaran mempunyai anggaran untuk pembangunan kompleks gedung perkantoran yang terdiri: 1). Anggaran gedung utama Rp100 miliar, 2). Anggaran jalan masuk Rp1 miliar, 3). Anggaran parkir Rp1 miliar, 4). Anggaran taman Rp2 miliar, 5). Anggaran gerbang Rp1 miliar dan 6). Anggaran pagar Rp1,5 miliar. Hasil kajian terbaik yang dilakukan oleh sekretaris daerah selaku PA bersama PPK, ialah :

- A. Seluruh kegiatan pembangunan disatukan dalam satu paket.
- B. Dipecah menjadi 6 paket.
- C. Gedung utama satu paket, jalan masuk dan parkir satu paket, gerbang dan pagar satu paket, serta taman satu paket.
- D. Menjadi satu paket dengan kewajiban mensubkan kepada lima perusahaan kecil.

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

85. Dalam suatu seleksi jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, Pokja ULP harus menetapkan metode penilaian kualifikasi. Mana di antara empat metode penilaian kualifikasi di bawah ini yang paling tepat :

- A. Penilaian persyaratan administrasi kualifikasi dengan sistem nilai, dan penilaian persyaratan teknis kualifikasi dengan sistem nilai.
- B. Penilaian persyaratan administrasi kualifikasi dengan sistem nilai, dan penilaian persyaratan teknis kualifikasi dengan sistem gugur.
- C. Penilaian persyaratan administrasi kualifikasi dengan sistem gugur, dan penilaian persyaratan teknis kualifikasi dengan sistem nilai.
- D. Penilaian persyaratan administrasi kualifikasi dengan sistem gugur, dan penilaian persyaratan teknis kualifikasi dengan sistem gugur.

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

86. Agar pembukaan penawaran dapat berjalan lancar tanpa banyak sanggahan dari peserta pengadaan. Pokja ULP harus melakukan persiapan yang baik. Di bawah ini yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut ialah :

- A. Mengingatkan anggota pokja agar memeriksa tanda pengenal dan surat tugas kepada peserta pengadaan.
- B. Mengingatkan anggota pokja bahwa meskipun tidak ada peserta pengadaan yang hadir, pembukaan penawaran tetap dibuka pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai ketentuan tentang penundaan pembukaan penawaran.
- C. Mengingatkan anggota pokja dalam hal pembukaan penawaran konsultan perorangan tidak boleh mewakilkan.
- D. Mengingatkan anggota pokja agar paling tidak satu di antaranya memaraf semua dokumen penawaran asli.

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

87. DIPA/DPA sering ditetapkan terlambat, terutama APBD, sedangkan proses perubahan/revisi anggaran sulit dan memakan waktu lama sehingga pekerjaan pada awal tahun anggaran sulit dilaksanakan. Menurut Anda, solusi apa yang sudah ada pengaturan dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya.

- A. Proses pengadaan barang/jasa boleh dilaksanakan dengan penunjukan langsung.
- B. Proses pengadaan boleh tidak diumumkan untuk mempercepat waktu pelaksanaannya.
- C. Proses pengadaan boleh dilakukan sebelum DIPA/DPA ditetapkan, dengan syarat rencana kegiatan anggaran sudah disetujui DPR/DPD.
- D. Proses pengadaan harus menunggu DIPA/DPA ditetapkan oleh PA/KPA dan sudah harus disetujui oleh pimpinan K/L/D/I yang berwenang.

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

88. Suatu Pokja ULP akan mengadakan barang yang kompleks yang akan menggunakan metode evaluasi sistem biaya selama umur ekonomis yang mencakup harga alat, biaya pengoperasian, biaya perawatan, dan umur ekonomis alat tersebut. Siapa yang menetapkan biaya-biaya tersebut :

- A. Harga alat ditawarkan oleh penawar, sedangkan biaya pengoperasian, perawatan, dan umur ekonomis ditentukan oleh PPK.
- B. Harga alat ditawarkan oleh penawar, sedangkan biaya pengoperasian, perawatan, dan umur ekonomis ditentukan oleh Pokja ULP dalam dokumen pemilihan.
- C. Harga alat ditawarkan oleh penawar, sedangkan biaya pengoperasian, perawatan, dan umur ekonomis ditentukan berdasarkan harga rata-rata penawaran yang masuk.
- D. Harga alat, biaya pengoperasian, perawatan, dan umur ekonomis ditawarkan oleh penawar.

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

89. Dinas pendidikan kabupaten akan melakukan renovasi gedung sekolah secara swakelola. Dalam pelaksanaannya, selain tenaga ahli yang terdapat di dinas tersebut diperlukan pula tenaga ahli/konsultan dari luar. Selain itu diperlukan pula pengadaan bahan-bahan bangunan berupa semen, pasir, kayu, cat, dll. Pekerjaan fisik diperkirakan akan selesai dalam waktu empat bulan. Perkiraan biaya ialah sebagai berikut : - Tenaga ahli Rp60 juta, - Bahan bangunan Rp400 juta.

Bagaimana jadwal yang benar dari pekerjaan swakelola tersebut dan siapa saja pelaksana serta bagaimana metode pemilihannya :

- A. Bulan pertama pekerjaan fisik sudah dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengadaan konsultan dan bahan bangunan dengan metode penunjukan langsung oleh tim swakelola.
- B. Bulan pertama dilakukan pengadaan konsultan dengan penunjukan langsung oleh tim perencana swakelola, bulan kedua pengadaan bahan oleh tim pelaksana swakelola, dan bulan ketiga mulai pelaksanaan fisik.
- C. Bulan pertama dilakukan pengadaan konsultan perorangan dengan metode seleksi umum bersamaan dengan pengadaan bahan dengan metode pelelangan umum dan keduanya dilaksanakan oleh Pokja ULP, bulan kedua mulai pelaksanaan fisik.
- D. Bulan pertama dilakukan pengadaan konsultan dengan penunjukan langsung oleh Pokja ULP dan pengadaan bahan untuk bulan kedua. Bulan kedua, ketiga, dan keempat, pengadaan bahan untuk bulan-bulan berikutnya dengan cara pengadaan langsung oleh Pokja ULP.

D

TIPE Essay: Alfa/Bravo/Charli/Delta

90. Dalam mengevaluasi penawaran jasa konsultansi dengan metode pagu anggaran setelah koreksi aritmatik dengan menggunakan jumlah tenaga ahli yang ada dalam perhitungan penyusunan HPS urutan penawaran ialah sebagai berikut: 1. PT A Rp185.000.000 2. PT B Rp197.000.000 3. PT C Rp179.000.000 4. PT D Rp183.000.000. Pagu Anggaran Rp190.000.000. Apabila menggunakan jumlah tenaga ahli yang diusulkan oleh PT B, harga penawarannya ialah Rp188.000.000. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan Pokja ULP:

- A. Menggugurkan PT B karena harga penawarannya setelah koreksi aritmatik di atas pagu anggaran.
- B. Melanjutkan evaluasi dengan evaluasi administrasi dan teknis dan apabila memperoleh nilai tertinggi, PT B ditetapkan sebagai pemenang.
- C. Melakukan koreksi aritmatik dengan menggunakan jumlah tenaga ahli rata-rata yang diusulkan penyedia jasa.
- D. Melakukan koreksi aritmatik dengan menggunakan jumlah tenaga ahli yang diusulkan masing-masing penyedia jasa.

A